LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WILANGAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (*face to face*) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik

yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Wilangan Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Wilangan Tahun 2025-2029 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Wilangan Tahun 2025-2029 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Wilangan Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Wilangan Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Wilangan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
2. Renstra Kecamatan Wilangan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

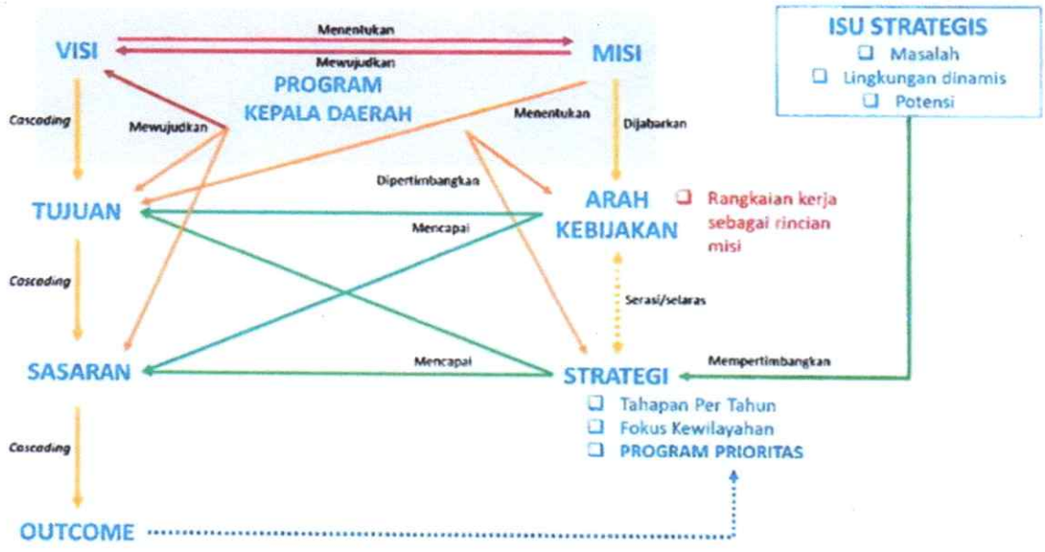
Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra yang dilanjutkan dengan pemberian pembekalan tugas tim melalui kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis penyusunan Renstra serta kegiatan penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan Renstra. Proses selanjutnya berturut-turut adalah penyusunan Rancangan Teknokratik (Rantek), penyusunan Rancangan Awal (Ranwal), penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir (Rankhir) hingga penetapan Renstra dengan Peraturan Bupati.

Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alur berikut:

Gambar 1.1.

Bagan Konsep Penyusunan Renstra PD



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan:

(a) Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029;

(b) Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2024;

(c) Evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2024 dalam pencapaian hasil *(outcome)*;

(d) Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

(e) Kebijakan nasional;

(f) Regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik;
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029.
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;

Maksud dan Tujuan

1.1.1. Maksud

Penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;

c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang;
1.2 Landasan Hukum;
1.3 Maksud dan Tujuan;
1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
   a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah;
   b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
   c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
   d. Kelompok Sasaran Layanan;
   e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan.
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah
   a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
   b. Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra PD;
3.2 Sasaran Renstra PD;
3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran;
3.4 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD 2025-2029;
3.5 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD 2025-2029;

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra

4.2. Uraian Program

4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU);

4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Wilangan memiliki luas wilayah 4.913.828 Ha yang terdiri dari kawasan permukiman dan pekarangan seluas 273.575 Ha, lahan kering seluas 129.066 Ha, sawah seluas 1.171.341 Ha dan lainnya seluas 3.312,9 Ha.

Kecamatan Wilangan memiliki batas wilayah :

Utara : Kab. Madiun,

Timur : Kec. Bagor,

Selatan : Kec. Sawahan,

Barat : Kab. Madiun

Secara administratif Kecamatan Wilangan terdiri dari 6 desa yaitu :

No	Desa	Kecamatan (Km)	Pasar (Km)
1.	Sudimoroharjo	14	0,3
2.	Ngadipiro	5,7	0,2
3.	Wilangan	0,3	
4.	Mancon	3,8	
5.	Ngudikan	5,5	
6.	Sukoharjo	7,0	

Sumber data : Profil Kependudukan Kecamatan Wilangan Tahun 2024

Data Demografi Penduduk di Kecamatan Wilangan

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan
1	Sudimoroharjo	4045	4137
2	Ngadipiro	1682	1938
3	Wilangan	2637	2172
4	Mancon	2898	2838
5	Ngudikan	2542	2405
6	Sukoharjo	1958	2127
	Jumlah Penduduk	15762	15617

Sumber data : Profil Kependudukan Kecamatan Wilangan Tahun 2024

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Wilangan.

1. Tugas Pokok

   Tugas pokok Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

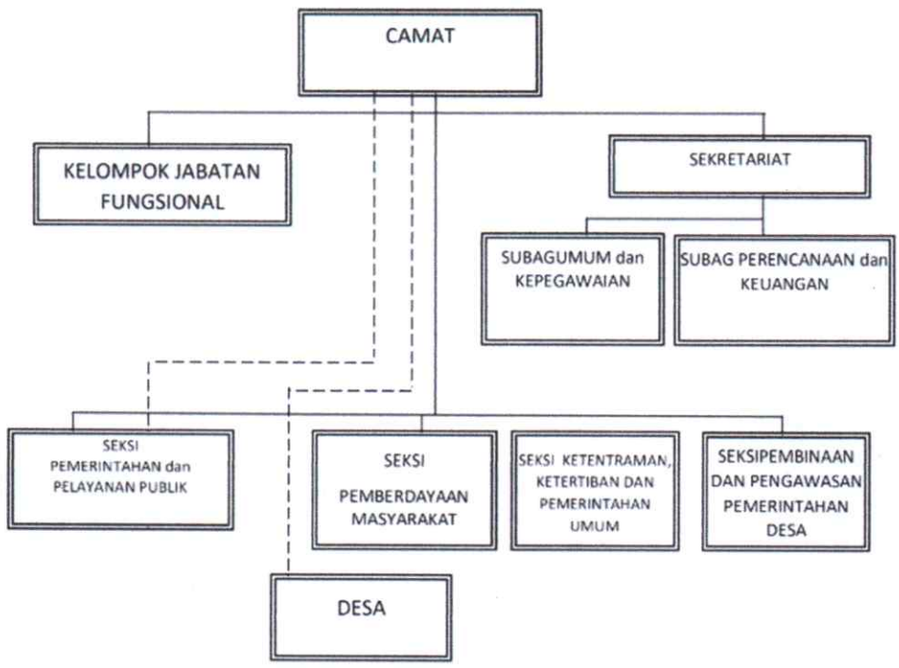
   Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi:

   a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
   b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
   c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
   d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
   e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
   f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
   h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
   i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

3. Struktur Organisasi

Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan pada Pasal 4 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa Kecamatan Wilangan adalah Kecamatan dengan Tipe A.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan

2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

1. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
3. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
5. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
8. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
9. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
2. pengelolaan urusan keuangan;
3. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
4. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
2. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
4. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
5. melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

6. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
7. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
9. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
10. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

1. melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
2. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
3. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
4. melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
5. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
6. melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

1. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila,

pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;

2. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
3. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4. melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
5. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
6. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
7. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
8. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
10. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
11. melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

1. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
2. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

3. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
4. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
5. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
6. melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
7. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
8. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
9. melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
10. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
11. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
12. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
13. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
14. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
15. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Wilangan adalah sebagai berikut:

1.1 Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Wilangan sebanyak 8 (delapan), yang terisi sebanyak 7 (tujuh) jabatan struktural dan 1 (satu) jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 5 (lima) orang pelaksana. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Pegawai Kecamatan Wilangan

Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	4
4.	Kasubbag	1
5.	Staf/PNS	5
6.	Non ASN	8
Jumlah		20

Sumber : Laporan DUK Kecamatan Wilangan tahun 2024

1.2 Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel Pegawai Kecamatan Wilangan

Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2024

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina	IV/b	1
2.	Pembina	IV/a	-
3.	Penata Tingkat I	III/d	5
4.	Penata	III/c	1
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	2
6.	Penata Muda	III/ a	2
7.	Pengatur Tk.I	II/d	-
8.	Pengatur	II/c	-
9.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1
Jumlah			12

Sumber : Laporan DUK Kecamatan Wilangan tahun 2024

1.2.1 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Wilangan sebagai berikut :

Tingkat pegawai Kecamatan Wilangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel Pegawai Pada Kantor Kecamatan Wilangan

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2024

No.	Pendidikan	Golongan Ruang
1.	S2	1
2.	S1	5
3.	D3	2
4.	SMA	4
5.	SMP	0
	JUMLAH	12

Sumber : Laporan DUK Kecamatan Wilangan tahun 2024

1.3 Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi di ambil dari laporan KIB B Invetaris Aset BMD tahun 2024 meliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat:
3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
   - Roda dua sebanyak 3 (tiga) Unit yaitu Honda Win tahun 1997, Honda Supra X125 Tahun 2007 dan Yamaha Vixion Tahun 2014
4. Barang Milik Daerah inventaris kantor lainnya sebagai berikut :
   - Meja Kerja : 9 (sembilan) buah
   - Meja layanan : 1 (satu) buah
   - Kursi : 12 (dua belas) buah
   - Kursi Tunggu : 3 (tiga) buah
   - Komputer khusus KTP SIAK 1 (satu) unit
   - Komputer : 3 (Satu) unit
   - Laptop : 9 (sembilan) unit
   - Printer : 12 (dua belas) unit
   - Scanner : 2 (dua) unit
   - AC : 9 (sembilan) unit
   - Sound System : 1 (satu) unit
   - CCTV : 1 (satu) unit/set

c. **Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Wilangan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.1. dan Tabel 2.2. dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada tahun		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				82	84	86	82.5	-	-	100.6%		
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan				80	82	84	84	-	-	105%		

Sumber: Laporan Evaluasi Renja PD Tahun 2024

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Anggaran	Realiasasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,384,193,700	2,367,239,393	2,414,584,715	2,236,902,076	-	-	93.82 %	-	-		

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Anggaran	Realiasasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100,662,800	72,974,800	74,434,600	84,483,382	-	-	83.93 %	-	-		
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	188,411,520	55,544,600	56,656,400	165,614,810	-	-	87.90 %	-	-		
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	93,964,600	66,621,800	67,953,800	85,557,000	-	-	91.05 %	-			
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	125,164,650	87,607,000	89,359,000	121,980,000	-	-	97.46 %				
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	251,696,000	205,808,500	209,923,500	214,924,100	-	-	85.39 %	-	-		

Sumber: Evaluasi Renja 2024

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dari Tabel 2.1., kita dapat mengetahui bahwa pada semua target sudah terpenuhi semua. Target yang terpenuhi adalah terjadi karena dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dan stakeholder di Kecamatan Wilangan.

Sedangkan pada table 2.2., kita dapat mengetahui bahwa pada Tahun 2024, rasio antara anggaran dan realisasi pada predikat Tinggi dan sangat Tinggi tidak ada yang rendah bahkan sangat rendah. Hal ini bisa terjadi karena kerjasama yang baik dari semua pegawai.

Tabel Data Fasilitas Pendidikan Formal dan Non Formal di Kecamatan Wilangan

No	Desa	PAUD/ TK	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/ MA	Perguruan Tinggi	Ponpes	Pendidikan Kesetaraan	Kelompok Belajar/ Pamong Belajar	Perpustakaan
1	Sudimoroharjo	3	5	1	-	-	2	-	-	1
2	Ngadipiro	4	3	-	-	-	-	-	-	1
3	Wilangan	5	4	1	1	-	-	-	-	1
4	Mancon	3	3	2	-	-	1	-	-	1
5	Ngudikan	2	3	1	-	-	-	-	-	1
6	Sukoharjo	3	4	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik

Tabel Data Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Wilangan

No	Desa	Rumah Sakit	Puskesmas	Klinik	Pustu	Polindes	Apotik
1	Sudimoroharjo	-	-	-	1	1	-
2	Ngadipiro	-	-	-	1	1	2
3	Wilangan	-	-	-	-	1	-
4	Mancon	-	1	-	-	1	1
5	Ngudikan	-	-	-	1	-	-
6	Sukoharjo	-	-	1	-	1	1

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik

Tabel Data Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Wilangan

No	Desa	RT	RW	BPD	LPM	Posyandu	Karang Taruna	Linmas (orang)
1	Sudimoroharjo	35	16	9	9	3	1	32
2	Ngadipiro	21	4	7	9	2	1	35
3	Wilangan	26	8	9	8	4	1	28
4	Mancon	33	13	9	11	4	1	41
5	Ngudikan	28	9	9	9	2	1	32
6	Sukoharjo	25	12	7	12	4	1	39
	JUMLAH	168	62	50	58	19	6	207

Sumber Data : Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tabel Data Lembaga Ekonomi Desa di Kecamatan Wilangan

No	Desa	BUMDesa	Bumdesma	Pasar	Koperasi	Kopwan	LKM (Kelurahan)
1	Sudimoroharjo	1	-	1	-	1	-
2	Ngadipiro	1	-	1	-	1	-
3	Wilangan	1	1	-	-	1	-
4	Mancon	1	-	-	-	1	-
5	Ngudikan	1	-	-	-	1	-
6	Sukoharjo	1	-	-	-	1	-
	JUMLAH	6	1	2	-	6	-

Sumber Data : Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tabel Data Infrastruktur Desa di Kecamatan Wilangan

No	Desa	Jalan (km)	Jembatan (unit)	Drainase (km)	Embung
1	Sudimoroharjo	145	15	16	-
2	Ngadipiro	8	5	8	-
3	Wilangan	10	11	8	-
4	Mancon	65	7	20	1
5	Ngudikan	15	7	10	-

No	Desa	Jalan (km)	Jembatan (unit)	Drainase (km)	Embung
6	Sukoharjo	10	5	8	-
	JUMLAH	253	50	70	1

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel Data Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Wilangan

No	Desa	LSM	Organisasi Masyarakat	Organisasi Profesi	Organisasi Keagamaan
1	Sudimoroharjo	-	-	1	1
2	Ngadipiro	-	-	1	1
3	Wilangan	-	-	1	1
4	Mancon	-	-	1	1
5	Ngudikan	-	-	1	1
6	Sukoharjo	-	-	1	1

Sumber Data : Seksi Trantib dan Pemerintahan Umum

Tabel Data Jumlah Gangguan Trantibum di Kecamatan Wilangan Tahun 2024

No	Desa	Balap Liar	minuman beralkohol	Galian Minerba	Penertiban Reklame	Penertiban PKL	Pencurian	Perkalahian
1	Sudimoroharjo	-	2	1	1	-	-	-
2	Ngadipiro	-	2	-	1	-	-	1
3	Wilangan	-	4	-	1	-	1	1
4	Mancon	3	5	-	1	-	1	-
5	Ngudikan	-	5	-	1	-	-	2
6	Sukoharjo	-	3	-	1	-	-	1

Sumber Data : Seksi Trantib dan Pemerintahan Umum

Tabel Data konflik sosial di Kecamatan Wilangan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Konflik sosial di Kec. Wilangan
1	Kec. Wilangan	40

Sumber Data : Seksi Trantib dan Pemerintahan Umum

Tabel Data Pembinaan desa dan kelurahan di Kecamatan Wilangan Tahun 2024

No	Desa	RPJMDesa (Jumlah Dokumen)	RKPDesa (Jumlah Dokumen)	APBDesa (Jumlah Dokumen)	LPPDes (Jumlah Dokumen)	LKPDes (Jumlah Dokumen)	IPPDes (Jumlah Dokumen)	RKA Kelurahan (Jumlah Dokumen)	Laporan Keuangan Kelurahan (Jumlah Dokumen)
1	Sudimoroharjo	1	1	1	1	1	1	1	1

2	Ngadipiro	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Wilangan	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Mancon	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Ngudikan	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Sukoharjo	1	1	1	1	1	1	1	1
	JUMLAH	6	6	6	6	6	6	6	6

Sumber Data : Seksi BinwasDes

Tabel Data Jenis Pelayanan Paten di Kecamatan Wilangan Tahun 2024

No	Jenis pelayanan	Tahun 2024
1	Adminduk capil	153
2	Perijinan	-
3	Administrasi lainnya	164

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan layanan publik

Tabel Data Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Wilangan Tahun 2024

No	Jenis pelayanan	Tahun 2024
1	Kecamatan Sehat	1
2	Kecamatan Layak Anak	1
3	Pengarusutamaan dan Kesetaraan Gender	1
4	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	2
5	Fasilitasi dan Koordinasi Pemungutan PBB	4
6	Kemiskinan	2

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan layanan publik

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Wilangan adalah masyarakat dan desa di Kecamatan Wilangan.

e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Mitra Kecamatan Wilangan dalam pemberian layanan adalah Koramil dan Polsek sebagai mitra kecamatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum, yang bertugas:

a. Koordinasi dan fasilitasi

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi; dan
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;

Selanjutnya dapat diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Wilangan

Potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, professional, dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, dan transparan	Peningkatan ekonomi local, penanggulan kemiskinan, dan peningkatan SDM, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	Ketahanan terhadap perubahan iklim, kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya alam	Konflik bersenjata, ancaman lingkungan seperti perubahan iklim dan cuaca ekstrem, di informasi dan polarisasi social, ketimpangan ekonomi dan potensi kemerosotan ekonomi global	Penentasan kemiskinan ekstrem, pengembangan infrastruktur dan digitalisasi desa, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, pencegahan dan penanganan stunting, serta penguatan BUMDes yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, infrastruktur antar wilayah, penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi lokal	• Pemanfaatan ruang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. • Optimalisasi peran serta dan partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. • Pelayanan Prima • Peningkatan Sinergitas Kecamatan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan jangka menengah Kecamatan Wilangan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Sasaran jangka menengah Kecamatan Wilangan adalah hasil rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah, dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, Kecamatan Wilangan mendukung Visi **"MEWUJUDKAN KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT."**

Kecamatan Wilangan sebagai pelaksana terdepan bidang pemerintahan sebagai kepanjangantangan dari Bupati dalam mewujudkan visi dan misi. Maka Kecamatan Wilangan mendukung misi ke-2 yakni **"Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan"**, dengan Program Unggulan Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi.

Misi ke-2 tersebut dijabarkan dalam Tujuan Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, yang diukur dengan indikator kinerja yaitu berupa Indeks Sinergitas Kecamatan.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Dari Tujuan yang ada, maka dirumuskan sasaran Kecamatan Wilangan yaitu:

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan

b. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan
Indikator : Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan

c. Meningkatnya tertib administrasi desa Desa
Indikator : Persentase Desa tertib administrasi desa

3.3. Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Wilangan											
- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan		Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	73,59	73,59	75	77	79	81	83	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)	82,5	82,5	83,5	84,5	85,5	86,5	87,5	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan g angguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan (%)	-37,93	16	15	14	13	12	11	
		Meningkatnya tertib administrasi desa Desa	Persentase Desa tertib administrasi desa (%)	100	100	100	100	100	100	100	

3.4. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD 2025-2029

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Wilangan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
2. Meningkatkan pelayanan publik serta melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Menurunkan persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah;
4. Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan demi tercapainya desa tertib administrasi.

3.5. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD 2025-2029

Sedangkan Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Wilangan, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah
3. Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah
4. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
7. Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah
8. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan

9. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah
10. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat.
11. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa
12. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM
13. Meningkatkan Inovasi/kreativitas kecamatan pada segala aspek

Berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangka Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4.

Arah Kebijakan Kecamatan Wilangan

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah yang baik dan pelayanan publik yang inovatif	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	
			- Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan - Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah - Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi	

			pemungutan PBB - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah - Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat, UKS tingkat kecamatan - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM - Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	
			- Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah - Meningkatkan	

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Pd Pemerintah Kabupaten Nganjuk

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Wilangan							
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan				Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

			koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan	
			Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa	

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN INDIKATIF

4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Wilangan selama 5 tahun ke depan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Wilangan. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Wilanganakan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Maka teknik perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra 5 tahun kedepan bisa dilihat pada tabel 4.1

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Wilangan		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan dengan unit pelaksana teknis dinas/badan, intansi vertikal, dan lintas sektor	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instans Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Wilangan		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				kecamatan	Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
				Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Wilangan		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Wilangan		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya fasilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan			Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan (%)		
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Wilangan		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Wilangan		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya fasilitsi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Wilangan		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Meningkatnya tertib administrasi desa Desa			Persentase Desa tertib administrasi desa (%)		
			Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Wilangan		Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya fasilitasi penyusunan administrasi kelembagaan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Wilangan		Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya fasilitasi penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

4.2 Uraian Program

Dari Teknik perumusan yang telah di rencanakan, maka tersusunlah Program beserta indikator yang dapat membantu tercapainya Sasaran yang ingin dicapai, yaitu sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

TABEL 4.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					3.113.600.350		3.175.722.357		3.238.205.775		3.303.679.889		3.367.443.430	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.620.879.950		2.673.147.549		2.725.579.470		2.780.801.058		2.834.107.021	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	69,8	71	72	2.620.879.950	72,5	2.673.147.549	73	2.725.579.470	73,5	2.780.801.058	74	2.834.107.021	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					83.605.000		85.277.100		86.982.642		88.722.294		90.496.740	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Wilangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	80	80	80	72.930.000	82	74.388.600	84	75.876.372	86	77.393.899	88	78.941.777	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Wilangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	80	80	80	3.925.000	82	4.003.500	84	4.083.570	86	4.165.241	88	4.248.546	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Wilangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	80	80	80	6.750.000	82	6.885.000	84	7.022.700	86	7.163.154	88	7.306.417	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					68.656.400		70.029.528		71.430.119		72.858.722		74.315.897	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Wilangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	80	80	80	68.656.400	82	70.029.528	84	71.430.119	86	72.858.722	88	74.315.897	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					65.900.000		67.218.000		68.562.360		69.933.607		71.332.279	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Wilangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	80	80	80	30.000.000	82	30.600.000	84	31.212.000	86	31.836.240	88	32.472.965	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Wilangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	80	80	80	35.900.000	82	36.618.000	84	37.350.360	86	38.097.367	88	38.859.314	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					117.959.000		120.318.180		122.724.544		125.179.035		127.682.616	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Wilangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	80	80	80	117.959.000	82	120.318.180	84	122.724.544	86	125.179.035	88	127.682.616	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					156.600.000		159.732.000		162.926.640		166.185.173		169.508.877	
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Wilangan	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	80	80	80	121.600.000	82	124.032.000	84	126.512.640	86	129.042.893	88	131.623.751	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Wilangan	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	80	80	80	35.000.000	82	35.700.000	84	36.414.000	86	37.142.280	88	37.885.126	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					3.113.600.350.00		3.175.722.357.00		3.238.205.775.00		3.303.679.889.00		3.367.443.430.00	

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Nganjuk

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				3.113.600.350		3.175.722.357		3.238.205.775		3.303.679.889		3.367.443.430		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.620.879.950		2.673.147.549		2.725.579.470		2.780.801.058		2.834.107.021		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	69,8	72	2.620.879.950	72,5	2.673.147.549	73	2.725.579.470	73,5	2.780.801.058	74	2.834.107.021	7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Wilangan	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.235.000		30.839.700		31.456.494		32.085.624		32.727.337		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	30.235.000	1	30.839.700	1	31.456.494	1	32.085.624	1	32.727.337		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2		2		2		3		2			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.550.000		8.721.000		8.895.420		9.073.328		9.254.795	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	8.550.000	2	8.721.000	2	8.895.420	3	9.073.328	2	9.254.795	
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.785.000		4.880.700		4.978.314		5.077.880		5.179.438	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.785.000	1	4.880.700	1	4.978.314	1	5.077.880	1	5.179.438	
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.165.000		4.248.300		4.333.266		4.419.931		4.508.330	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.165.000	1	4.248.300	1	4.333.266	1	4.419.931	1	4.508.330	
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.580.000		2.631.600		2.684.232		2.737.917		2.792.675	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.580.000	1	2.631.600	1	2.684.232	1	2.737.917	1	2.792.675	
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.580.000		2.631.600		2.684.232		2.737.917		2.792.675	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.580.000	1	2.631.600	1	2.684.232	1	2.737.917	1	2.792.675	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.825.000		1.861.500		1.898.730		1.936.705		1.975.439	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	1.825.000	5	1.861.500	5	1.898.730	5	1.936.705	5	1.975.439	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.750.000		5.865.000		5.982.300		6.101.946		6.223.985	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	5.750.000	2	5.865.000	2	5.982.300	2	6.101.946	2	6.223.985	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.152.577.000		2.195.628.540		2.239.541.110		2.284.331.932		2.330.018.512	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	14	2.145.126.000	14	2.188.028.520	14	2.231.789.090	14	2.276.424.872	14	2.321.953.310	

7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.145.126.000		2.188.028.520		2.231.789.090		2.276.424.872		2.321.953.310			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	14	2.145.126.000	14	2.188.028.520	14	2.231.789.090	14	2.276.424.872	14	2.321.953.310			
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	7.451.000	1	7.600.020	1	7.752.020	1	7.907.060	1	8.065.202			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	13	13		13		13		13		13				
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.821.000		3.897.420		3.975.368		4.054.875		4.135.973			
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	3.821.000	1	3.897.420	1	3.975.368	1	4.054.875	1	4.135.973			
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.630.000		3.702.600		3.776.652		3.852.185		3.929.229			
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	3.630.000	13	3.702.600	13	3.776.652	13	3.852.185	13	3.929.229			
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.942.000		3.000.840		3.060.857		3.122.074		3.184.515			
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	2.942.000	1	3.000.840	1	3.060.857	1	3.122.074	1	3.184.515			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	14	14		14		14		14		14				
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				558.000		569.160		580.543		592.154		603.997			
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	558.000	1	569.160	1	580.543	1	592.154	1	603.997			

7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.384.000		2.431.680		2.480.314		2.529.920		2.580.518	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	14	14	2.384.000	14	2.431.680	14	2.480.314	14	2.529.920	14	2.580.518	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	
Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				136.684.000		139.417.680		142.206.033		145.050.154		147.951.158	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	48.000.000	4	48.960.000	4	49.939.200	4	50.937.984	4	51.956.744	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	11	11		11		11		11		11		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11	11		11		11		11		11		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				3.500.000		3.570.000		3.641.400		3.714.228		3.788.513	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	3.500.000	4	3.570.000	4	3.641.400	4	3.714.228	4	3.788.513	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		3.060.000		3.121.200		3.183.624		3.247.296	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	3.000.000	4	3.060.000	4	3.121.200	4	3.183.624	4	3.247.296	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				34.500.000		35.190.000		35.893.800		36.611.676		37.343.910	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11	11	34.500.000	11	35.190.000	11	35.893.800	11	36.611.676	11	37.343.910	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		7.140.000		7.282.800		7.428.456		7.577.025	

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	11	11	7.000.000	11	7.140.000	11	7.282.800	11	7.428.456	11	7.577.025		
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	11	11	88.684.000	11	90.457.680	11	92.266.833	11	94.112.170	11	95.994.414		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.601.000		2.653.020		2.706.080		2.760.202		2.815.406		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	11	11	2.601.000	11	2.653.020	11	2.706.080	11	2.760.202	11	2.815.406		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85.000.000		86.700.000		88.434.000		90.202.680		92.006.734		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	85.000.000	1	86.700.000	1	88.434.000	1	90.202.680	1	92.006.734		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.083.000		1.104.660		1.126.753		1.149.288		1.172.274		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3	3	1.083.000	3	1.104.660	3	1.126.753	3	1.149.288	3	1.172.274		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				93.319.950		95.186.349		97.090.076		99.031.877		101.012.514		
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	51	6	93.319.950	6	95.186.349	6	97.090.076	6	99.031.877	6	101.012.514		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	6		6		6		6		6			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				41.974.350		42.813.837		43.670.114		44.543.516		45.434.386		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	51	6	41.974.350	6	42.813.837	6	43.670.114	6	44.543.516	6	45.434.386		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				51.345.600		52.372.512		53.419.962		54.488.361		55.578.128		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	6	51.345.600	6	52.372.512	6	53.419.962	6	54.488.361	6	55.578.128		

7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				35.425.000		36.133.500		36.856.170		37.593.293		38.345.159		
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	2	35.425.000	2	36.133.500	2	36.856.170	2	37.593.293	2	38.345.159		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.425.000		10.633.500		10.846.170		11.063.093		11.284.355		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	10.425.000	1	10.633.500	1	10.846.170	1	11.063.093	1	11.284.355		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				25.000.000		25.500.000		26.010.000		26.530.200		27.060.804		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	2	25.000.000	2	25.500.000	2	26.010.000	2	26.530.200	2	27.060.804		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				162.197.000		165.440.940		167.868.730		172.086.104		173.367.826		
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	3	162.197.000	3	165.440.940	3	167.868.730	3	172.086.104	3	173.367.826		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	9		9		9		9		9			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5	8		8		8		8		8			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				22.000.000		22.440.000		22.888.800		23.346.576		23.813.508		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	3	22.000.000	3	22.440.000	3	22.888.800	3	23.346.576	3	23.813.508		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				4.500.000		4.590.000		4.681.800		4.775.436		4.870.945		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5	8	4.500.000	8	4.590.000	8	4.681.800	8	4.775.436	8	4.870.945		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.200.000		10.404.000		10.612.080		10.824.322		

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	9	10.000.000	9	10.200.000	9	10.404.000	9	10.612.080	9	10.824.322		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				125.697.000		128.210.940		129.894.130		133.352.012		133.859.051		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	125.697.000	4	128.210.940	4	129.894.130	4	133.352.012	4	133.859.051		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				83.605.000		85.277.100		86.982.642		88.722.294		90.496.740		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Wilangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	80	80	3.925.000	82	4.003.500	84	4.083.570	86	4.165.241	88	4.248.546	7.01.0.00.0.00.25.00 00 - Kecamatan Wilangan	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				3.925.000		4.003.500		4.083.570		4.165.241		4.248.546		
Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	3.925.000	1	4.003.500	1	4.083.570	1	4.165.241	1	4.248.546		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3.925.000		4.003.500		4.083.570		4.165.241		4.248.546		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	3.925.000	1	4.003.500	1	4.083.570	1	4.165.241	1	4.248.546		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Wilangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	80	80	6.750.000	82	6.885.000	84	7.022.700	86	7.163.154	88	7.306.417		
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				6.750.000		6.885.000		7.022.700		7.163.154		7.306.417		
Terlaksananya fasilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1	1	6.750.000	1	6.885.000	1	7.022.700	1	7.163.154	1	7.306.417		

7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				6.750.000		6.885.000		7.022.700		7.163.154		7.306.417		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1	1	6.750.000	1	6.885.000	1	7.022.700	1	7.163.154	1	7.306.417		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Wilangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	80	80	72.930.000	82	74.388.600	84	75.876.372	86	77.393.899	88	78.941.777		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				72.930.000		74.388.600		75.876.372		77.393.899		78.941.777		
Terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan dengan unit pelaksana teknis dinas/badan, intansi vertikal, dan lintas sektor	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	72.930.000	1	74.388.600	1	75.876.372	1	77.393.899	1	78.941.777		
	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				68.569.000		69.793.500		71.189.370		72.613.157		74.065.420		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	5	5	68.569.000	5	69.793.500	5	71.189.370	5	72.613.157	5	74.065.420		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4.361.000		4.595.100		4.687.002		4.780.742		4.876.357		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	4.361.000	1	4.595.100	1	4.687.002	1	4.780.742	1	4.876.357		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN				68.656.400		70.029.528		71.430.119		72.858.722		74.315.897		

KELURAHAN														
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Wilangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	80	80	68.656.400	82	70.029.528	84	71.430.119	86	72.858.722	88	74.315.897	7.01.0.00.0.0 0.25.0000 - Kecamatan Wilangan	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				68.656.400		70.029.528		71.430.119		72.858.722		74.315.897		
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	9	1	49.406.600	1	50.394.732	1	51.402.627	1	52.430.680	1	53.479.294		
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				49.406.600		50.394.732		51.402.627		52.430.680		53.479.294		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	9	1	49.406.600	1	50.394.732	1	51.402.627	1	52.430.680	1	53.479.294		
Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7	6	19.249.800	6	19.634.796	6	20.027.492	6	20.428.042	6	20.836.603		
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				19.249.800		19.634.796		20.027.492		20.428.042		20.836.603		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7	6	19.249.800	6	19.634.796	6	20.027.492	6	20.428.042	6	20.836.603		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				65.900.000		67.218.000		68.562.360		69.933.607		71.332.279		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Wilangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	80	80	35.900.000	82	36.618.000	84	37.350.360	86	38.097.367	88	38.859.314	7.01.0.00.0.0 0.25.0000 - Kecamatan	

7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				35.900.000		36.618.000		37.350.360		38.097.367		38.859.314	Wilangan	
Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	1	35.900.000	1	36.618.000	1	37.350.360	1	38.097.367	1	38.859.314		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				35.900.000		36.618.000		37.350.360		38.097.367		38.859.314		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	1	35.900.000	1	36.618.000	1	37.350.360	1	38.097.367	1	38.859.314		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Wilangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	80	80	30.000.000	82	30.600.000	84	31.212.000	86	31.836.240	88	32.472.965		
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				30.000.000		30.600.000		31.212.000		31.836.240		32.472.965		
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	14	1	30.000.000	1	30.600.000	1	31.212.000	1	31.836.240	1	32.472.965		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				30.000.000		30.600.000		31.212.000		31.836.240		32.472.965		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	14	1	30.000.000	1	30.600.000	1	31.212.000	1	31.836.240	1	32.472.965		

7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				117.959.000		120.318.180		122.724.544		125.179.035		127.682.616		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Wilangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	80	80	117.959.000	82	120.318.180	84	122.724.544	86	125.179.035	88	127.682.616	7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Wilangan	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				117.959.000		120.318.180		122.724.544		125.179.035		127.682.616		
Terlaksananya fasilitsi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	110	300	117.959.000	300	120.318.180	300	122.724.544	300	125.179.035	300	127.682.616		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				117.959.000		120.318.180		122.724.544		125.179.035		127.682.616		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	110	300	117.959.000	300	120.318.180	300	122.724.544	300	125.179.035	300	127.682.616		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				156.600.000		159.732.000		162.926.640		166.185.173		169.508.877		

Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Wilangan	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	80	80	121.600.000	82	124.032.000	84	126.512.640	86	129.042.893	88	131.623.751	7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Wilangan	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				156.600.000		159.732.000		162.926.640		166.185.173		169.508.877		
Terlaksananya fasilitasi penyusunan administrasi kelembagaan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	7	2	121.600.000	2	124.032.000	2	126.512.640	2	129.042.893	2	131.623.751		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				103.200.000		105.264.000		107.369.280		109.516.666		111.706.999		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1	103.200.000	1	105.264.000	1	107.369.280	1	109.516.666	1	111.706.999		
7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				18.400.000		18.768.000		19.143.360		19.526.227		19.916.752		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	7	2	18.400.000	2	18.768.000	2	19.143.360	2	19.526.227	2	19.916.752		
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Wilangan	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	80	80	35.000.000	82	35.700.000	84	36.414.000	86	37.142.280	88	37.885.126		
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				156.600.000		159.732.000		162.926.640		166.185.173		169.508.877		
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7	5	35.000.000	5	35.700.000	5	36.414.000	5	37.142.280	5	37.885.126		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				35.000.000		35.700.000		36.414.000		37.142.280		37.885.126		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7	5	35.000.000	5	35.700.000	5	36.414.000	5	37.142.280	5	37.885.126		

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah

Kabupaten Nganjuk

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Wilangan										
I	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
1	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	73,59	73,59	75	77	79	81	83	

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Pemerintah Kabupaten Nganjuk

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Wilangan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	
		Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Wilangan	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
		Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Wilangan	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
		Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Wilangan	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
		Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Wilangan	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Wilangan	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Wilangan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
3.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Wilangan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Wilangan	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
		Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Wilangan	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Wilangan	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
4.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Wilangan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
5.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Wilangan	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Wilangan	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Wilangan	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
			7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.

Indikator Kinerja Kecamatan Wilangan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Wilangan terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra Kecamatan Wilangan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Sinergitas Kecamatan, *baseline* sebesar 73,59 bersumber pada LKjIP Kecamatan Wilangan Tahun 2024. Adapun cara mendapatkan *baseline* tersebut adalah dari Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN).
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik, *baseline* sebesar 82,5 bersumber pada LKjIP Kecamatan Wilangan Tahun 2024. Adapun cara mendapatkan *baseline* tersebut adalah dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan setiap tribulan pada Aplikasi e-SUKMA Jatim.
3. Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, *baseline* sebesar -37,93 bersumber pada LKjIP

Kecamatan Wilangan Tahun 2024. Ini di dapat dari hasil koordinasi dengan Polsek Wilangan (laporan Polsek Wilangan terkait dengan kejadian/trantibum) dimana pada tahun 2024 terjadi kelonjakan pelanggaran trantibum.

4. Persentase Desa Tertib Administrasi Desa, *baseline* sebesar 100 bersumber pada LKjIP Kecamatan Wilangan Tahun 2024. Ini di dapat dari aplikasi EPDESKEL.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Renstra Pd Pemerintah Kabupaten Nganjuk

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.25.0000 – Kecamatan Wilangan									
2.	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	73,59	73,59	75	77	79	81	83	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai	82,5	82,5	83,5	84,5	85,5	86,5	87,5	
4.	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	-37,93	16	15	14	13	12	11	
5.	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	

b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dengan didapatnya Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Wilangan, maka terbentuklah IKK sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Renstra Pemerintah Kabupaten Nganjuk

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Indeks Sinergitas Kecamatan	positif	Nilai	73,59	73,59	75	77	79	81	83	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Kecamatan Wilangan.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001